

PERAN BAPPERIDA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Della Ayu Octavia¹, Rini Puji Astuti², Nadia Mahsa Kalifa³, Evi Triana Al Wakhidah⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Email: dellayuoctavia@gmail.com¹, rinipujiastuti@unikhas.ac.id², nadiamasyaa@gmail.com³,
evitrn89@gmail.com⁴

ABSTRAK

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam konteks pembangunan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) memiliki peran strategis dalam merumuskan kebijakan, menyusun perencanaan, mengoordinasikan program pembangunan, serta memastikan keterpaduan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perspektif ekonomi syariah memberikan landasan normatif bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menekankan keadilan, kesejahteraan, kemaslahatan, keseimbangan, serta keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran BAPPERIDA dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa BAPPERIDA memiliki peran penting dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen perencanaan daerah melalui penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, serta penguatan riset dan inovasi. Dari perspektif ekonomi syariah, peran tersebut mencerminkan implementasi nilai keadilan, amanah, kemaslahatan, dan tanggung jawab terhadap lingkungan sehingga mampu mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *BAPPERIDA, Pembangunan Berkelanjutan, Ekonomi Syariah, Perencanaan Pembangunan, SDGs.*

ABSTRACT

Sustainable development is a development concept aimed at meeting the needs of the current generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs. In the context of regional development, the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (BAPPERIDA) plays a strategic role in formulating policies, drafting plans, coordinating development programs, and ensuring the integration of economic, social, and environmental aspects. The Sharia economic perspective provides a normative foundation asserting that development should not merely focus on economic growth but also emphasize justice, welfare, public interest, balance, and sustainability. This study aims to analyze BAPPERIDA's role in realizing sustainable development from a Sharia economic perspective. It employs a qualitative method using a literature review approach, gathering data from books, scientific journals, legislation, and relevant official documents. The findings indicate that BAPPERIDA plays a crucial role in integrating sustainable development principles into regional planning documents specifically the Long-Term Regional Development Plan (RPJPD), Medium-Term Regional Development Plan (RPJMD), and Regional Government Work Plan (RKPD) as well as in strengthening research and innovation. From a Sharia economic perspective, this role reflects the implementation of values such as justice, trustworthiness, public interest, and environmental responsibility, thereby supporting inclusive and sustainable regional development.

Keywords: *BAPPERIDA, Sustainable Development, Sharia Economics, Development Planning, SDGs.*

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi paradigma utama dalam penyelenggaraan pembangunan di berbagai negara, termasuk Indonesia¹. Konsep ini menekankan bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga keseimbangan antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Pemerintah Indonesia mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) ke dalam kebijakan nasional sebagai bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045².

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan memerlukan perencanaan yang sistematis, terarah, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Perencanaan tersebut menjadi landasan dalam menentukan prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, serta penyusunan program yang mampu menjawab berbagai tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, perubahan iklim, ketahanan pangan, dan transformasi ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dituntut menyusun kebijakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek pemerataan kesejahteraan, kelestarian lingkungan, dan tata kelola pemerintahan yang baik³.

Dalam konteks pemerintahan daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) memiliki posisi yang sangat strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab menyusun perencanaan pembangunan, mengoordinasikan pelaksanaan pembangunan lintas sektor, melaksanakan penelitian, serta mendorong inovasi daerah. Penambahan fungsi riset dan inovasi pada BAPPERIDA menunjukkan komitmen pemerintah untuk memperkuat penyusunan kebijakan yang berbasis data dan bukti (evidence-based policy), sehingga setiap program pembangunan yang dirancang dapat lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

Peran BAPPERIDA menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan daerah. Perubahan iklim, perkembangan teknologi digital, urbanisasi, peningkatan jumlah penduduk, serta dinamika ekonomi global menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyusun perencanaan yang adaptif dan inovatif⁴. Oleh karena itu, BAPPERIDA tidak hanya berfungsi sebagai penyusun dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD, tetapi juga sebagai koordinator yang memastikan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan yang disusun. Perencanaan yang baik harus mampu mengidentifikasi potensi daerah, mengatasi berbagai permasalahan pembangunan, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, BAPPERIDA memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional sehingga seluruh program yang dilaksanakan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selain itu, BAPPERIDA juga berperan dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan guna memastikan tercapainya indikator pembangunan yang telah ditetapkan.

¹ Amsari, Syahrul, Isnaini Harahap, and Zuhri M. Nawawi. "Transformasi paradigma pembangunan ekonomi: Membangun masa depan berkelanjutan melalui perspektif ekonomi syariah." *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 8.1 (2024): 729-738.

² Abdoellah, Oekan S. *Pembangunan berkelanjutan di Indonesia: Di persimpangan jalan*. Gramedia Pustaka Utama, 2016.

³ Rosana, Mira. "Kebijakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial* 1.1 (2018).

⁴ Rahadian, A. H. "Strategi pembangunan berkelanjutan." *Prosiding Seminar STIAM*. Vol. 3. No. 1. 2016.

Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan juga dapat dikaji melalui perspektif ekonomi syariah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan tujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, serta kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, ekonomi syariah menempatkan aspek moral, etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas pembangunan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan keseimbangan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan⁵.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pembangunan diarahkan untuk mewujudkan maqashid syariah, yaitu tercapainya kemaslahatan melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi prinsip-prinsip seperti keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), dan amanah menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan⁶. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya dinilai dari tingginya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pembangunan mampu mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan⁷.

Hubungan antara pembangunan berkelanjutan dan ekonomi syariah semakin relevan dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan nasional maupun daerah. Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas menegaskan bahwa ekonomi syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), mengurangi kemiskinan, serta mempercepat pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)⁸. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi syariah dapat menjadi salah satu pendekatan strategis dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan⁹.

Meskipun demikian, implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan pemanfaatan hasil riset dalam penyusunan kebijakan, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta belum meratanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan. Tantangan tersebut mengharuskan BAPPERIDA untuk terus memperkuat kapasitas kelembagaan, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, serta mengembangkan inovasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran BAPPERIDA dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perencanaan pembangunan daerah dan ekonomi syariah, sekaligus menjadi referensi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, kesejahteraan masyarakat, serta keberlanjutan lingkungan sesuai dengan arah pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

⁵ Ismail, Muhammad. "Peran Ekonomi Islam Dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Ekonomi." *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)* 3.6 (2024): 510-519.

⁶ Asriani, Asriani, Fenny Damayanti Rusmana, and Opan Arifudin. "Kajian Paradigma Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)* 3.2 (2024): 203-214.

⁷ Malau, Parningotan, et al. "Peran Hukum dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882 3.1 (2025): 20-30.

⁸ Malau, Parningotan, et al. "Peran Hukum dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* E-ISSN: 3031-8882 3.1 (2025): 20-30.

⁹ Asriani, Asriani, Fenny Damayanti Rusmana, and Opan Arifudin. "Kajian Paradigma Ekonomi Berkelanjutan Di Indonesia Sebagai Negara Berkembang Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)* 3.2 (2024): 203-214.

KAJIAN LITERATUR

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) merupakan perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan melalui fungsi perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, serta inovasi daerah¹⁰. Perubahan nomenklatur dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) menjadi BAPPERIDA menunjukkan adanya penguatan fungsi riset dan inovasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan publik. Melalui fungsi tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy) sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Kementerian PANRB, 2023; Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

BAPPERIDA memiliki tugas menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta melakukan pengendalian, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan. Selain itu, BAPPERIDA berfungsi mengoordinasikan perangkat daerah dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kebijakan nasional dan target pembangunan berkelanjutan sehingga tercipta pembangunan yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Dalam era transformasi digital dan pembangunan berbasis inovasi, BAPPERIDA juga memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan riset yang mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan daerah, seperti kemiskinan, pengangguran, perubahan iklim, ketahanan pangan, dan transformasi ekonomi. Oleh karena itu, kualitas perencanaan pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan BAPPERIDA dalam memanfaatkan data, hasil penelitian, serta inovasi sebagai dasar penyusunan kebijakan daerah¹¹.

2. Konsep Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) merupakan konsep pembangunan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Konsep ini mengintegrasikan tiga dimensi utama, yaitu pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Ketiga dimensi tersebut harus berjalan secara seimbang agar pembangunan mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat (United Nations Development Programme [UNDP], 2022).

Di Indonesia, pembangunan berkelanjutan diwujudkan melalui implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) yang terdiri atas 17 tujuan dan 169 target. SDGs menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan sehingga seluruh program pembangunan dapat memberikan dampak terhadap pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, kesetaraan gender, pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, hingga penguatan kelembagaan¹².

Implementasi pembangunan berkelanjutan memerlukan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, BAPPERIDA berperan sebagai koordinator pembangunan yang memastikan bahwa seluruh perangkat daerah menjalankan program pembangunan sesuai dengan prinsip keberlanjutan dan target SDGs. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan

¹⁰ Rahmadi, Alfi. "LAPORAN PENELITIAN BAPPENAS 2024-Ketahanan Informatika Melalui Basis Data Terpadu MTN." (2024).

¹¹ Datupalinge, Bangkit Ayatullah, and Dedi Kusmana. *Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara*. Diss. IPDN, 2024.

¹² Datupalinge, Bangkit Ayatullah, and Dedi Kusmana. *Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara*. Diss. IPDN, 2024.

pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Bappenas, 2023).

3. Perspektif Ekonomi Syariah dalam Pembangunan

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadis dengan tujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab sosial. Dalam ekonomi syariah, pembangunan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan nasional, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan yang merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta menjaga kelestarian lingkungan sebagai amanah dari Allah SWT¹³.

Konsep pembangunan dalam ekonomi syariah berlandaskan pada maqashid syariah, yaitu tujuan syariat Islam yang mencakup perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal). Seluruh aktivitas ekonomi, termasuk kebijakan pembangunan, harus diarahkan untuk menjaga lima tujuan tersebut sehingga mampu menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat luas (Bank Indonesia, 2024).

Prinsip-prinsip ekonomi syariah, seperti keadilan (al-'adl), keseimbangan (tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan amanah, memiliki kesesuaian dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Nilai-nilai tersebut mendorong pemerintah untuk mengelola sumber daya secara bertanggung jawab, mengurangi kesenjangan ekonomi, memperkuat pemberdayaan masyarakat, serta menjaga keseimbangan antara aktivitas ekonomi dan kelestarian lingkungan (KNEKS, 2023).

4. Peran BAPPERIDA dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Dalam perspektif ekonomi syariah, BAPPERIDA tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyusun perencanaan pembangunan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa pembangunan yang direncanakan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat. Kebijakan pembangunan yang disusun harus mencerminkan nilai keadilan, pemerataan, transparansi, dan akuntabilitas sehingga pembangunan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan maupun kesenjangan sosial (Bank Indonesia, 2024).

BAPPERIDA juga memiliki peran dalam mengembangkan inovasi daerah yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis syariah, seperti penguatan UMKM halal, pengembangan industri halal, ekonomi kreatif syariah, digitalisasi pelayanan publik, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut tidak hanya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga memperkuat inklusi ekonomi dan menciptakan kesejahteraan yang lebih merata sesuai dengan prinsip ekonomi syariah¹⁴.

Selain itu, penerapan prinsip good governance yang meliputi transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, dan efisiensi juga merupakan bagian dari implementasi nilai amanah dalam ekonomi syariah. Oleh karena itu, keberhasilan BAPPERIDA dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan pembangunan dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat¹⁵.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis secara mendalam peran

¹³ Arifudin, Arifudin, et al. "Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2.2 (2024): 156-168.

¹⁴ Arifudin, Arifudin, et al. "Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 2.2 (2024): 156-168.

¹⁵ Rahmadi, Alfi. "LAPORAN PENELITIAN BAPPENAS 2024-Ketahanan Informatika Melalui Basis Data Terpadu MTN." (2024).

BAPPERIDA dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan perspektif ekonomi syariah melalui kajian berbagai literatur ilmiah, dokumen kebijakan, dan hasil penelitian terdahulu¹⁶.

Sumber data dalam penelitian terdiri atas data sekunder, yaitu artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku, peraturan perundang-undangan, laporan resmi Kementerian PPN/Bappenas, dokumen KNEKS, Bank Indonesia, serta publikasi lain yang relevan dan diterbitkan pada periode 2021-2025. Pemilihan sumber dilakukan berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, kredibilitas penerbit, dan kebaruan informasi agar hasil penelitian memiliki dasar ilmiah yang kuat¹⁷.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu mengidentifikasi, mengumpulkan, mengkaji, dan mengelompokkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, tugas dan fungsi BAPPERIDA, serta konsep ekonomi syariah. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengidentifikasi tema-tema utama, membandingkan hasil penelitian terdahulu, kemudian menginterpretasikan keterkaitan antara peran BAPPERIDA dan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan¹⁸.

Untuk menjaga validitas data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah, dokumen pemerintah, dan hasil penelitian sebelumnya. Melalui teknik tersebut, diharapkan hasil analisis memiliki tingkat keakuratan, objektivitas, dan kredibilitas yang tinggi sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai peran BAPPERIDA dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan perspektif ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran BAPPERIDA dalam Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan

Hasil kajian menunjukkan bahwa BAPPERIDA memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap perencanaan pembangunan, BAPPERIDA berfungsi menyusun arah kebijakan pembangunan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen-dokumen tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang selaras dengan visi pembangunan nasional dan target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). Penyusunan dokumen perencanaan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi daerah, kebutuhan masyarakat, serta isu-isu strategis yang berkembang sehingga pembangunan yang dilaksanakan lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Selain menyusun dokumen perencanaan, BAPPERIDA juga berperan sebagai koordinator pembangunan daerah. Melalui fungsi koordinasi, BAPPERIDA mengintegrasikan berbagai program lintas sektor agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Koordinasi tersebut penting untuk memastikan bahwa setiap program pembangunan saling mendukung dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Sinergi antar-OPD juga meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran serta mempercepat pencapaian indikator pembangunan yang telah ditetapkan¹⁹.

Dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, BAPPERIDA menerapkan pendekatan pembangunan berbasis data (data-driven planning) melalui pemanfaatan data statistik, hasil

¹⁶ Pali, Kecamatan Abab Kabupaten. "Metodelogi penelitian." *Repository. Radenfatah. Ac. IdVW Sujarweni Yogyakarta: Pustaka Baru Perss* (2014).

¹⁷ Creswell, John W., and V. L. Plano Clark. "Revisiting mixed methods research designs twenty years later." *Handbook of mixed methods research designs* 1.1 (2023): 21-36.

¹⁸ Krippendorff, Klaus. *The reliability of generating data*. CRC Press, 2022.

¹⁹ Datupalinge, Bangkit Ayatullah, and Dedi Kusmana. *Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara*. Diss. IPDN, 2024.

penelitian, dan inovasi daerah. Pendekatan ini memungkinkan pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran karena didasarkan pada kondisi riil masyarakat. Penggunaan data yang akurat juga membantu pemerintah dalam mengidentifikasi permasalahan pembangunan, seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, stunting, kualitas pendidikan, dan kondisi lingkungan sehingga kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Bappenas, 2024).

2. Implementasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Berdasarkan hasil kajian literatur, konsep pembangunan berkelanjutan memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Dalam ekonomi syariah, pembangunan tidak hanya bertujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mewujudkan kesejahteraan yang merata (falah) melalui penerapan nilai keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), keseimbangan (tawazun), dan amanah. Nilai-nilai tersebut menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan publik agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan²⁰.

Prinsip keadilan (al-'adl') tercermin dalam penyusunan program pembangunan yang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh akses terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pelayanan publik. Dalam konteks BAPPERIDA, prinsip ini diwujudkan melalui perencanaan pembangunan yang memperhatikan pemerataan pembangunan antarwilayah sehingga tidak terjadi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Pemerataan pembangunan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan berkelanjutan karena mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Bank Indonesia, 2024).

Prinsip kemaslahatan (maslahah) mengarahkan setiap kebijakan pembangunan agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Oleh karena itu, setiap program yang disusun BAPPERIDA perlu mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan secara bersamaan. Kebijakan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan aspek sosial dan lingkungan berpotensi menimbulkan ketimpangan serta kerusakan sumber daya alam. Dengan demikian, konsep maslahah menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat luas²¹.

Prinsip keseimbangan (tawazun) menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan. BAPPERIDA memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur, kawasan industri, maupun sektor ekonomi lainnya tetap memperhatikan daya dukung lingkungan sehingga pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mendukung pembangunan rendah karbon dan pengurangan emisi gas rumah kaca (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

3. Peran Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Penambahan fungsi riset dan inovasi pada BAPPERIDA menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah. Riset berfungsi menghasilkan informasi ilmiah yang dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan, sedangkan inovasi berperan menciptakan solusi terhadap berbagai permasalahan pembangunan. Melalui pemanfaatan hasil penelitian, pemerintah daerah dapat merancang program yang lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing²².

²⁰ Hidayat, Sutan Emir, et al. "Enhancing Indonesia's Islamic Economy Ecosystem: Innovative Legal and Institutional Strategic Approach." *Intellectual Discourse* 34.1 (2026).

²¹ Hidayat, Sutan Emir, et al. "Enhancing Indonesia's Islamic Economy Ecosystem: Innovative Legal and Institutional Strategic Approach." *Intellectual Discourse* 34.1 (2026).

²² Datupalinge, Bangkit Ayatullah, and Dedi Kusmana. *Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara*. Diss. IPDN, 2024.

Inovasi daerah juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berbagai inovasi, seperti digitalisasi pelayanan pemerintahan, sistem informasi pembangunan daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan mampu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Dari perspektif ekonomi syariah, inovasi tersebut merupakan bentuk implementasi nilai amanah, yaitu tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat (Bank Indonesia, 2024).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat menjadi faktor pendukung keberhasilan inovasi daerah. Kolaborasi tersebut memungkinkan lahirnya berbagai solusi inovatif dalam mengatasi persoalan pembangunan, seperti pengembangan UMKM halal, ekonomi kreatif berbasis syariah, pengelolaan sampah berkelanjutan, hingga pemanfaatan energi terbarukan. Dengan demikian, riset dan inovasi menjadi instrumen penting dalam mempercepat pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah²³.

4. Tantangan BAPPERIDA dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Meskipun memiliki peran yang strategis, implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah sehingga masih ditemukan program pembangunan yang belum terintegrasi secara maksimal. Kondisi ini dapat menghambat efektivitas pelaksanaan pembangunan dan menyebabkan penggunaan sumber daya yang kurang efisien²⁴.

Tantangan lainnya adalah keterbatasan kualitas sumber daya manusia, terutama dalam pemanfaatan data, teknologi informasi, dan hasil penelitian sebagai dasar penyusunan kebijakan. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kapasitas yang sama dalam mengembangkan inovasi daerah sehingga kualitas perencanaan pembangunan masih beragam. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan menjadi langkah penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan BAPPERIDA (Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

Di samping itu, keterbatasan anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan. Kondisi tersebut menuntut BAPPERIDA untuk menyusun skala prioritas pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan anggaran harus dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sebagai bentuk pelaksanaan prinsip amanah dalam pengelolaan keuangan publik²⁵.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan BAPPERIDA dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menyusun dokumen perencanaan, tetapi juga oleh keberhasilan dalam mengintegrasikan hasil riset, inovasi, kolaborasi antarpemangku kepentingan, serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam setiap kebijakan pembangunan. Dengan demikian, pembangunan daerah diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan (KNEKS, 2023; Kementerian PPN/Bappenas, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa BAPPERIDA memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, koordinasi antarperangkat daerah, pelaksanaan penelitian, pengembangan inovasi, serta monitoring dan evaluasi terhadap

²³ Hidayat, Sutan Emir, et al. "Enhancing Indonesia's Islamic Economy Ecosystem: Innovative Legal and Institutional Strategic Approach." *Intellectual Discourse* 34.1 (2026).

²⁴ Datupalinge, Bangkit Ayatullah, and Dedi Kusmana. *Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara*. Diss. IPDN, 2024.

²⁵ Indonesia, Bank. "The impact of global capital flows on financial intermediation and monetary transmission in Indonesia." *BIS Papers Chapters* 148 (2024): 181-186.

pelaksanaan program pembangunan. Keberadaan fungsi riset dan inovasi pada BAPPERIDA semakin memperkuat kualitas perencanaan pembangunan karena kebijakan yang dihasilkan disusun berdasarkan data, hasil penelitian, dan kebutuhan masyarakat sehingga lebih efektif dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan.

Dari perspektif ekonomi syariah, peran BAPPERIDA tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada upaya mewujudkan kemaslahatan, keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti al-‘adl (keadilan), maslahah (kemaslahatan), tawazun (keseimbangan), dan amanah menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, serta pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, pembangunan yang dilaksanakan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi pembangunan berkelanjutan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, belum maksimalnya pemanfaatan hasil riset dalam penyusunan kebijakan, serta keterbatasan anggaran pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan BAPPERIDA melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi pembangunan, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kolaborasi dengan perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

Secara keseluruhan, BAPPERIDA memiliki peran penting sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan daerah yang mampu mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Apabila fungsi tersebut dilaksanakan secara optimal, pembangunan daerah diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, mengurangi kesenjangan sosial, menjaga kelestarian lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdoellah, Oekan S. *Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia: Di Persimpangan Jalan*. Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Arifudin, Arifudin, et al. “Peran KNEKS dan Master Plan Ekonomi Islam Indonesia.” *Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi dan Keuangan Syariah*, vol. 2, no. 2, 2024, pp. 156–168.
- Amsari, Syahrul, Isnaini Harahap, and Zuhri M. Nawawi. “Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah.” *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, vol. 8, no. 1, 2024, pp. 729–738.
- Asriani, Asriani, Fenny Damayanti Rusmana, and Opan Arifudin. “Kajian Paradigma Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia sebagai Negara Berkembang dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia (JESI)*, vol. 3, no. 2, 2024, pp. 203–214.
- Bank Indonesia. “The Impact of Global Capital Flows on Financial Intermediation and Monetary Transmission in Indonesia.” *BIS Papers*, no. 148, 2024, pp. 181–186.
- Creswell, John W., and Vicki L. Plano Clark. “Revisiting Mixed Methods Research Designs Twenty Years Later.” *Handbook of Mixed Methods Research Designs*, vol. 1, no. 1, 2023, pp. 21–36.
- Datupalinge, Bangkit Ayatullah, and Dedi Kusmana. *Peran Bappenas dalam Mendukung Pemindahan Ibu Kota Negara*. Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), 2024.
- Hidayat, Sutan Emir, et al. “Enhancing Indonesia’s Islamic Economy Ecosystem: Innovative Legal and Institutional Strategic Approach.” *Intellectual Discourse*, vol. 34, no. 1, 2026.
- Ismail, Muhammad. “Peran Ekonomi Islam dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Berbasis Green Ekonomi.” *AN NAJAH: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Keagamaan*, vol. 3, no. 6, 2024, pp. 510–519.
- Krippendorff, Klaus. *The Reliability of Generating Data*. CRC Press, 2022.

- Malau, Parningotan, et al. "Peran Hukum dalam Mengatur Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan di Indonesia." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, vol. 3, no. 1, 2025, pp. 20–30.
- Pali, Kecamatan Abab Kabupaten. "Metodologi Penelitian." *Repository Raden Fatah*, 2014.
- Rahadian, A. H. "Strategi Pembangunan Berkelanjutan." *Prosiding Seminar STIAM*, vol. 3, no. 1, 2016.
- Rahmadi, Alfi. *Laporan Penelitian BAPPENAS 2024: Ketahanan Informatika Melalui Basis Data Terpadu MTN*. 2024.
- Rosana, Mira. "Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan di Indonesia." *Jurnal Kelola: Jurnal Ilmu Sosial*, vol. 1, no. 1, 2018.
- Sujarweni, V. Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press, 2014.
- .